

## POLISI BAWA Rp 514 JUTA DARI BTPN

SEMARANG, TRIBUN - Tim penyidik Polrestabes Semarang yang menangani kasus raibnya dana deposito Pemkot Semarang, mendaangi kantor Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang di Jalan MT Haryono No 715 Semarang, Jumat (29/5).

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin mengatakan, kedatangan tim penyidik tersebut untuk melakukan penyitaan tiga rekening deposito yang tidak diakui Pemkot Semarang. Tim yang dipimpin Panit I, AKP Ibnu, datang ke BTPN sekitar pukul 09.00. Mereka menaiki satu mobil dan langsung ke BTPN.

"Setelah sampai di BTPN, penyidik kemudian melakukan negosiasi dengan pihak bank dahulu. Setelah selesai negosiasi, penyidik mengambil uangnya dan satu jam kemudian pulang. Penyidik kemudian membawa uang Rp 514 juta yang dibungkus tas plastik," kata Burhanudin.

Uang Rp 514 juta yang diambil penyidik tersebut, kata Burhanudin, merupakan total uang dari tiga rekening deposito atas nama Walikota Semarang. Namun, karena Pemkot Semarang membantah memiliki tiga rekening deposito tersebut, sehingga dianggap tak bertuan.

■ KE HALAMAN 7

### Polisi Bawa...

■ DARI HALAMAN 1

"Uang tersebut kami sita dari tiga rekening misterius karena tidak bertuan dalam bentuk Bilyet Deposito Berjangka atasnama Walikota," ujar Burhanudin.

Penyitaan uang dari BTPN Semarang itu terkait kasus raibnya deposito Kasda Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar. Diduga, tiga rekening itu dibuat oleh mantan personal banker BTPN, Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK), yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Dari tiga rekening deposito tersebut, rinciannya masing-masing Rp 100 juta, Rp 400 juta, dan Rp 14 juta. Sehingga totalnya Rp 514 juta. Ketiganya rekening palsu, karena Pemkot sendiri mengaku tidak pernah membuat bilyet deposito tersebut," jelasnya.

Burhanudin mengatakan, penyitaan dilakukan sebagai upaya menyelamatkan uang negara. Saat ditanya mengenai kerugian negara, dia menjawab masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng.

"Kami melakukan penyitaan uang tersebut sebagai tindakan penyelamatan uang negara. Uang tersebut kemudian akan kami titipkan ke Kasda

Pemkot di Bank Jateng," tandasnya.

Burhanudin menambahkan, dalam kasus ini, pihaknya juga menyita satu buah laptop dan satu buah stempel bank BTPN Cabang Semarang. Barang-barang tersebut diserahkan oleh Dyah Ayu kepada penyidik beberapa waktu lalu dan dijadikan barang bukti.

Laptop dan stempel tersebut, lanjut Burhanudin, digunakan Diah Ayu untuk membuat rekening koran fiktif. Tujuannya agar Pemkot Semarang percaya bahwa dana deposito yang disimpan masih aman.

"Kemudian dia membuat stempel BTPN itu untuk memberi cap BTPN agar seolah resmi. Padahal, stempel BTPN itu dipesan dari tukang buat stempel," lanjutnya.

Sejauh ini pihak Polrestabes Semarang baru menetapkan dua tersangka, yakni mantan personal banker BTPN Semarang, Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kas Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, Suhantoro (SH). Keduanya dijadikan tersangka sejak

Kamis, 9 April 2015 lalu.

Sekedar mengingatkan, kasus ini bermula ketika Pemkot Semarang pada 2007 melalui Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Semarang menyimpan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk giro yang dirubah deposito senilai Rp 22,7 miliar ke Bank BTPN Semarang.

Selama lima tahun tidak ada permasalahan yang berarti. Atas rekomendasi BPK, pada Oktober 2014 DPKAD Kota Semarang mengubah jenis simpanan yang sebelumnya berupa giro ke bentuk deposito.

Kemudian awal 2015, DPKAD atas saran BPK meminta memperbarui nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh bank yang telah bekerjasama dengan Pemkot, satu diantaranya Bank BTPN. Saat memanggil sejumlah bank yang telah bekerjasama, hanya BTPN yang tidak hadir dalam proses pembaruan MoU.

Pemkot kemudian menyerahkan bukti berupa sertifikat dan rekening koran kepada BTPN pada 6 Januari 2015 lalu. Namun pihak BTPN tidak mengakui sertifikat dan rekening koran tersebut. Padahal setiap bulannya Pemkot masih menerima bunga deposito. (Wan/Nal)

#### STORY HIGHLIGHTS

- Polrestabes Semarang menyita tiga rekening deposito yang tidak diakui Pemkot Semarang senilai Rp 514 Juta dari BTPN.
- Setelah satu jam menunggu penyidik membawa uang tunai dalam kantong plastik keluar dari BTPN.
- Penyidik mengambil uang untuk keperluan penyelidikan.
- Dana kemudian dititipkan ke Kasda Pemkot di Bank Jateng.

**Tribun Jateng**  
**Halaman 1 dan 7**  
**Edisi Sabtu, 30 Mei 2015**

## Semua Transaksi Tercatat

**PEMERINTAH** Kota Semarang tidak mengakui keabsahan tiga rekening deposito miliknya yang disimpan sejak 2007 silam. Ketiga bilyet itu kini telah disita oleh Polrestabes setempat sebagai barang bukti.

Menurut sumber *Tribun*, pihak BTPN sebenarnya merasa yakin bahwa bilyet dengan total Rp 514 juta tersebut adalah uang milik Pemkot Semarang.

Menurut sumber, semua transaksi tercatat

di sistem dan ada buktinya, mulai dari pertama kali memasukkan hingga fluktuasi naik turun jumlah nominalnya yang akhirnya menyisakan pecahan masing-masing Rp 100 juta, Rp 400 juta, dan Rp 14 juta.

"BTPN punya bukti transaksi. OJK selaku pengawas perbankan juga membenarkan bahwa dari sistem RTGS (Real Time Gross

■ KE HALAMAN 7

## Semua Transaksi...

■ DARI HALAMAN 1

Settlement) kelihatan fluktuasinya, berapa yang sudah masuk dan keluar," paparnya.

Menurut sumber *Tribun*, sikap pemerintah yang tidak bersedia menganggap tiga bilyet itu sebagai bentuk menjaga nama baik.

"Hari ini ada penyitaan tiga bilyet deposito karena sang pemilik yakni Pemkot Semarang membantah memiliki tiga rekening deposito itu," katanya.

Sementara itu Eny Yuliati, selaku Corporate Communications BTPN, mengatakan pihaknya menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. BTPN akan bekerjasama dan mendukung penuh upaya dari penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

### Oknum orang dalam

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jateng dan DIY beberapa waktu lalu menemukan bukti baru berupa pemalsuan sertifikat deposito BTPN milik Pemkot.

Kepala OJK Kantor Regional IV Jateng-DIY, Santoso Wibowo, mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan BPK serta BTPN untuk membandingkan keaslian bilyet atau sertifikat deposito tersebut.

"Jadi kami sudah cukup meyakini, sertifikat yang ada di Pemda dipalsukan. Namun, untuk pembuktian dan keputusannya menjadi wewenang kepolisian dan pengadilan," kata Santoso, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, terdapat beberapa perbedaan pada bentuk fisik dua sertifikat itu. Untuk mendeteksi keasliannya, OJK melakukan pemeriksaan menggunakan alat keamanan krusus berupa sensor infrared.

"Kalau ditaruh di bawah sinar ultraviolet akan terpancar warna-warna yang sepertinya hitam putih tapi ada warna tertentu, itu yang punya BTPN. Sedangkan yang milik Pemda setelah di letakkan ehh kok putih doang," katanya.